

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam studi ekonomi politik internasional terdapat hubungan kausal antara ekonomi politik internasional dan ekonomi politik domestik. Dimana ketika perubahan terjadi dilingkungan ekonomi internasional akan berdampak pada pilihan kebijakan di domestik.¹ Hal ini dapat dilihat dari kebijakan ekonomi politik Republik Rakyat Tiongkok (Tiongkok) dalam menghadapi perlambatan ekonomi global 2014-2015. Perlambatan ekonomi global 2014-2015 dapat mempengaruhi kondisi perekonomian domestik Tiongkok sehingga kebijakan ekonomi Tiongkok harus disesuaikan. Penelitian ini fokus pada kebijakan ekonomi politik Tiongkok untuk mengatasi perlambatan ekonomi Tiongkok akibat perubahan kondisi ekonomi global.

Pada tahun 1979 Tiongkok mulai membuka diri terhadap ekonomi internasional dengan menerima perdagangan dan investasi asing serta mengimplementasikan reformasi pasar bebas. Setelah reformasi ekonomi, Tiongkok menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.² Dari tahun 1979 hingga 2014 PDB (produk domestik bruto) selalu berada di sekitar 10%, menjadikan Tiongkok sebagai pasar negara berkembang (*emerging markets*)³ dan salah satu kekuatan utama ekonomi internasional.⁴

¹ Jeffry Frieden, and Lisa Martin, *International Political Economy: Global and Domestic Interactions*, Political Science: The State of the Discipline, Ed. Ira Katznelson & Helen V Milner (New York: W.W. Norton, 2003), hal 121

² Wayne M. Morrison, *China's Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for The United State* (CRS Report, 2015), hal 5

³ *Emerging markets* atau pasar negara berkembang didefinisikan sebagai Negara-negara yang akhir-akhir ini memiliki pertumbuhan atau prospek pertumbuhan dimasa depan melebihi pasar tradisional.

Salah satu cara yang dilakukan Tiongkok dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah menjadikan perdagangan internasional sebagai sumber penting dalam pertumbuhan ekonomi.⁵ Tiongkok menjadikan ekspor sebagai sumber utama dalam ekonomi negara.⁶ Pada tahun 2014, sepuluh produk utama ekspor Tiongkok yakni alat elektronik, mesin, furniture, pakaian, alat medis, kendaraan, logam mulia, besi dan baja, menyumbang sebanyak 66,9% dari keseluruhan perdagangan internasional.⁷ Secara keseluruhan barang ekspor Tiongkok meningkat pesat dari tahun 1979 hingga 2014 yakni 14 milyar menjadi 2,3 trilyun dolar AS, dan impor meningkat dari 18 milyar menjadi 2 trilyun dolar AS. Tiongkok menjadi mitra dagang penting dan besar bagi banyak negara dunia bagi 130 negara di dunia pada tahun 2013.⁸

Meskipun ketergantungan Tiongkok semakin meningkat terhadap perdagangan internasional, Tiongkok tetap mempertahankan agar neraca perdagangan berada dikondisi surplus. Neraca perdagangan dideskripsikan sebagai selisih antara nilai ekspor dan impor dalam keseluruhan *output* yang dihasilkan negara dalam satu periode tertentu.⁹ Ketika neraca perdagangan berada diposisi positif maka perdagangan berarti surplus, hal ini terjadi ketika ekspor lebih tinggi di banding impor dan perdagangan berarti defisit jika mengalami

⁴ Wayne M. Morrison, *China's Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for The United States* (CRS Report, 2015), hal 1

⁵ Philip Lebel, *Economic Policy Management in China: Lesson for Developing Countries* (Beijing: Montclair State University, 1999), hal 9

⁶ Alessia Amighini dan Axel Berkfsky, *Xi's Policy Gambles: The Bumpy Road Ahead* (Milan: ISPI, 2015), hal 60

⁷ Daniel Workman, *China's Top 10 Exports*, www.worldstopexports.com, (diakses pada 10 Maret 2016)

⁸ China.org.cn, *Promoting China-Japan relations through Culture*, http://www.china.org.cn/opinion/2014-06/18/content_32690843.htm. (diakses pada 27 Juli 2016)

⁹ Jarrod Wiener dan Robert A. Schrire, *International Relations* (United Kingdom: Eolss Publishers Co.Ltd, 2009) hal 25

kondisi sebaliknya. Negara yang melakukan lebih banyak ekspor daripada impor memiliki lebih banyak kesempatan untuk memperoleh surplus neraca perdagangan dibandingkan negara yang melakukan sebaliknya.

Dalam upaya untuk memperoleh kondisi positif neraca perdagangan maka pemerintah akan mengeluarkan regulasi yang fokus pada kepentingan komersial dan kontrol terhadap perdagangan asing dengan tujuan memastikan kesejahteraan dan keamanan negara.¹⁰ Peningkatan ekspor dibanding impor dalam perdagangan internasional akan meningkatkan keuntungan neraca perdagangan negara karena mengalami surplus. Surplus neraca perdagangan juga dilakukan dengan menjaga agar nilai ekspor lebih besar dibanding dengan nilai impor. Hal ini diperoleh Tiongkok dengan prinsip bahwa impor yang baik bagi ekonomi negara adalah impor barang mentah. Barang mentah yang diimpor akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini terlihat dari konsumsi barang mentah dimana 47% semen, 37% persen kapas, 30% batu bara, 26% batu bara, dan 21% aluminium yang dihasilkan dunia dikonsumsi Tiongkok.¹¹

Anjuran untuk melakukan impor barang mentah dan tidak menganjurkan untuk ekspor barang mentah sejalan dengan kesadaran bahwa sumber daya dunia terbatas.¹² Meskipun negara telah memaksimalkan ekspor namun permintaan dunia adalah tetap sehingga produk ekspor negara harus memiliki kelebihan dari produk negara lain, dengan bersaing di tingkat harga. Barang mentah dianjurkan diproduksi di dalam negeri menjadi barang jadi yang kemudian di ekspor. Begitu juga dengan impor barang mentah yang akan digunakan untuk industri

¹⁰ Ibid, hal 27

¹¹ Ricky W. Griffin dan Michael W.Pustay, *Bisnis Internasional: Sebuah Perspektif Manajerial Edisi 8*, (Jakarta:Penerbit Salemba Empat, 2015), hal 38

¹² Jarrod Wiener dan Robert A. Schrire, *International Relations* (United Kingdom: Eolss Publishers Co.Ltd, 2009) hal 28

manufaktur. Bahan mentah yang di impor akan diproses menjadi barang jadi akan di ekspor kembali dengan harga yang lebih tinggi.

Dalam perspektif merkantilisme negara punya peran utama dalam mengatur jalannya ekonomi. Landreth dan Collander menyatakan bahwa negara merkantilisme akan melihat tujuan dari kegiatan ekonomi adalah produksi, sehingga kekayaan negara akan dilihat dari bagaimana negara mampu secara simultan mendorong produksi, meningkatkan ekspor dan menekan konsumsi domestik.¹³ Negara berfungsi untuk membuat kebijakan yang akan meningkatkan power dan kekayaan negara, tujuan akhirnya adalah menciptakan neraca perdagangan diantara negara-negara.¹⁴ Sejalan dengan itu teori stabilitas hegemoni memperlihatkan bahwa kekuatan ekonomi dapat digunakan untuk memperoleh power didunia internasional.¹⁵

Neraca perdagangan diperoleh dengan meningkatkan keunggulan kompetitif dari negara. Keunggulan kompetitif adalah teori persaingan bisnis yang populerkan oleh Michael E. Porter pada tahun 1985 dan disesuaikan dengan persaingan antara bangsa-bangsa, dimana keberhasilan ekonomi satu negara adalah bagian dari proses menang-kalah dengan negara lain. Keunggulan kompetitif suatu negara tergantung pada kemampuan dari industri melakukan inovasi dan meningkatkan kapasitas industri, sedangkan pemerintah dapat melakukan beberapa tindakan dengan mengeluarkan kebijakan untuk mendorong

¹³ Landreth,H and Colander DC, *History of Economic Thought* (Boston: Houghton Mifflin, 2002), hal 47

¹⁴ Ibid, hal 47

¹⁵ Tony Tai-Tung Liu dan Hung Ming-Te, *Hegemonic Stability and Northeast Asia : What Hegemon? What Stability?* (Journal of Asia Pasific Studies, 2011), hal 219

kemampuan industri domestik di pasar internasional.¹⁶ Kebijakan utama yang dianjurkan merkantilis adalah kebijakan keuangan.¹⁷ Dengan dorongan dari pemerintah bagi industri domestik diharapkan akan meningkatkan kapasitas produksi yang nantinya akan meningkatkan jumlah ekspor negara.

Keberhasilan Tiongkok dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga tidak lepas dari bagaimana Tiongkok merespon guncangan ekonomi internasional. Seperti pada krisis Asia tahun 1998 dan krisis finansial dunia tahun 2008-2009. Pada krisis Asia Tiongkok tidak memperoleh dampak yang signifikan karena Tiongkok menerapkan kontrol kapital yang kuat.¹⁸ Pada krisis finansial dunia tahun 2008-2009 Tiongkok berhasil memperbaiki kestabilan perekonomian dengan melakukan paket stimulus dan ekspansi moneter.¹⁹ Kebijakan ini berhasil terlihat dari PDB Tiongkok pada tahun 2009 yang tetap tumbuh yakni 9,2% dan naik pada tahun 2010 menjadi 10,4%.²⁰

Pada tahun 2014 hingga 2015 terjadi perlambatan ekonomi global 2014-2015. Perlambatan ekonomi global 2014-2015 dapat dilihat dari performa ekonomi utama dunia yakni Amerika Serikat (AS), Zona Euro, Jepang, dan negara berkembang.²¹ AS pada tahun 2014 mengalami defisit perdagangan, dan pada 2015 pertumbuhan di AS lebih rendah dari prediksi. Di Zona Euro inflasi

¹⁶ Michael E. Porter, *The Competitive Advantage of Nations* (Harvard Business Review, 1990), hal 73

¹⁷ Landreth, H and Colander DC, *History of Economic Thought* (Boston: Houghton Mifflin, 2002), hal 48

¹⁸ Francois Godement, *China's Economic downturn: The Facts Behind The Myth* (Ecfre.eu, 2015), hal 4

¹⁹ Yu Yongding, *China's Policy Responses to the Global Financial Crisis* (Melbourne: Richard Snape Lecture Productivity Commission, 2009), hal 9

²⁰ Borst dan Nicholas Lardy, *Maintaining Financial Stability in The People's Republic of China during Financial Liberalization* (Washington DC: Peterson Institute for International Economic, 2015), hal 5

²¹ Xuan Changneng, dkk, *China Financial Stability Report 2015* (China Financial Publishing Home, 2015), hal 3-10

masih tinggi pada tahun 2014 dan perbaikan ekonomi tidak berjalan dengan baik. Jepang mengalami defisit neraca perdagangan paling tinggi sejak 1979 pada tahun 2014, dan terus berlanjut hingga 2015. Sedangkan di negara berkembang pertumbuhan turun pada tahun 2014 dan terus berlanjut pada 2015. Dipertengahan tahun 2015 pertumbuhan global berada di 2,9% lebih rendah dari prediksi di 3,1 % dan lebih rendah juga dari tahun 2014 yakni 3,4 %.²²

Perlambatan ekonomi global 2014-2015 pada tahun 2014 hingga 2015 berdampak pada kondisi perekonomian Tiongkok.²³ Pada tahun 2014 Presiden Tiongkok Xi Jinping menyampaikan perubahan kondisi ekonomi Tiongkok dalam pidatonya di pertemuan *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Summit*. Xi Jinping menyatakan bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam ekonomi regional saat itu, termasuk bagi Tiongkok sendiri yakni dampak dari krisis finansial dunia tahun 2008/2009 masih ada dan perbaikan di beberapa negara yang tidak berjalan baik. Xi Jinping menyatakan bahwa Tiongkok mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebut Xi sebagai kondisi “*new normal*”.²⁴ Pada September 2015 dalam *Summer Davos Forum Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang* menyatakan bahwa perbaikan ekonomi internasional masih lemah. Terjadinya perlambatan pertumbuhan global membuat Tiongkok tidak mudah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di 7%.²⁵

²² United Nations, *World Economic Situation and Prospects 2015* (United Nations Publication, New York: 2015), hal 1

²³ World Bank Group Macroeconomics and Fiscal Management Global Practice. *China Economic Update June 2015* (The World Bank, 2015), hal 3

²⁴ *Opening Remarks by H.E. Xi Jinping President of the People Republic of China at the 22nd APEC Economic Leaders Meeting*, Beijing, 11 November 2014, <http://www.apec-china.org.cn/41/2014/11/13/3@2582.htm> (diakses pada 17 Januari 2016)

²⁵ *Transcript of Premier's meeting with Chinese and foreign Business representatives at the 9th Annual Meeting of The Champions/Summer Davos*, Dalian, 10 September 2015, http://news.xinhuanet.com/english/2015-09/11/c_134615607.htm (diakses pada 17 Januari 2016)

Selain itu perlambatan ekonomi Tiongkok juga akan memperparah ekonomi global.²⁶ Dalam laporan tahunan IMF (*International Monetary Fund*) pada Agustus 2015, menyatakan bahwa kondisi perekonomian Tiongkok sedang berada dalam masa transisi. Terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi namun dianggap lebih stabil, hal inilah yang disebut Presiden Xi sebagai kondisi *new normal*. Sehingga Tiongkok harus memiliki kebijakan yang tepat untuk mencegah resiko ekonomi yang dapat ditimbulkan oleh perlambatan ekonomi.

Perlambatan ekonomi global 2014-2015 mengakibatkan terjadinya penurunan permintaan di pasar global sedangkan penggerak utama ekonomi Tiongkok adalah sektor ekspor.²⁷ Sehingga terjadi penurunan pertumbuhan surplus neraca perdagangan. Semenjak tahun 1995 Tiongkok selalu mengalami surplus perdagangan yang konsisten, namun pada tahun 2015 pertumbuhan neraca perdagangan turun 8% dimana ekspor mengalami penurunan sebanyak 1,8%.²⁸

Selain surplus neraca perdagangan yang mengalami penurunan, PDB Tiongkok untuk pertama kalinya berada dibawah target di tahun 2014 yakni 7,4% dengan target 7,5% dan turun menjadi 7,0% di kuartal pertama tahun 2015.²⁹ Surplus neraca pembayaran turun 48% pada tahun 2014 dan terjadi peningkatan inflasi hingga tahun 2015.³⁰ Selain itu devisa turun hingga 93,9 triliun dolar AS

²⁶ IMF Country Report No. 15/234, *People's Republic of Tiongkok : 2015 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by The Executive Director for The People's Republic of Tiongkok*, (Washington, D.C.: IMF Publication Service, 2015), hal 21

²⁷ Alessia Amighini dan Axel Berkfsky, *Xi's Policy Gambles: The Bumpy Road Ahead* (Milan: ISPI, 2015), hal 60

²⁸ *China balance of trade*, ieconomics.com/china-balance-of-trade (diakses pada 9 maret 2016)

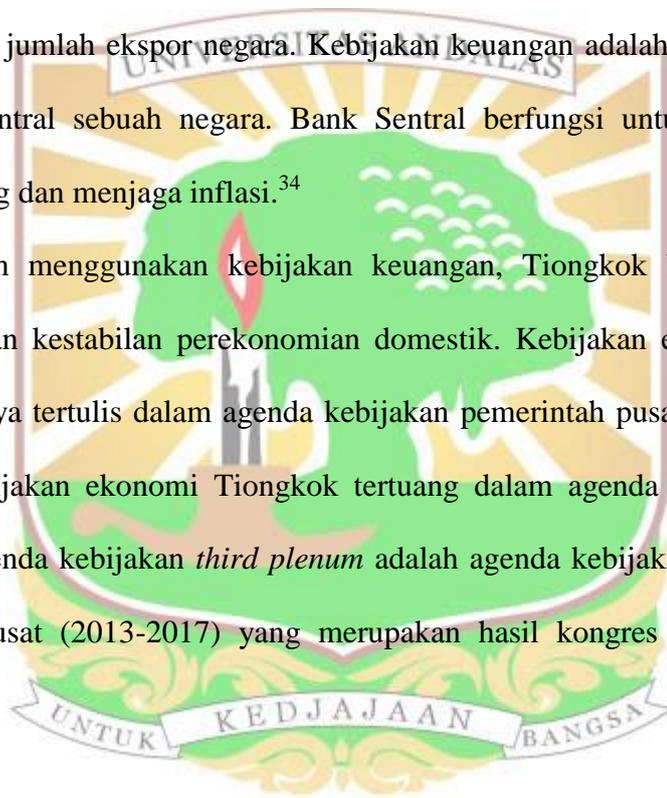
²⁹ Ibid, hal 5

³⁰ Ibid, hal 8

di Agustus 2015, penurunan paling tinggi paska perbaikan ekonomi pada krisis 2008/2009.³¹

Terjadinya perlambatan ekonomi domestik, mengharuskan Tiongkok untuk menyesuaikan kebijakan keuangan.³² Kebijakan keuangan dapat digunakan oleh pemerintah untuk mendorong kemampuan industri domestik di pasar internasional.³³ Dengan dorongan dari pemerintah bagi industri domestik diharapkan akan meningkatkan kapasitas produksi yang nantinya akan meningkatkan jumlah ekspor negara. Kebijakan keuangan adalah tanggungjawab dari Bank Sentral sebuah negara. Bank Sentral berfungsi untuk mengontrol peredaran uang dan menjaga inflasi.³⁴

Dengan menggunakan kebijakan keuangan, Tiongkok berupaya untuk mengembalikan kestabilan perekonomian domestik. Kebijakan ekonomi sebuah negara biasanya tertulis dalam agenda kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini kerangka kebijakan ekonomi Tiongkok tertuang dalam agenda kebijakan *third plenum*.³⁵ Agenda kebijakan *third plenum* adalah agenda kebijakan lima tahunan pemerintah pusat (2013-2017) yang merupakan hasil kongres partai komunis Tiongkok.



³¹ World Bank Group Macroeconomics and Fiscal Management Global Practice, *China Economic Update June 2015*, (The World Bank, 2015), hal 13

³² Francois Godement, *China's Economic downturn: The Facts Behind The Myth* (Ecfre.eu, 2015), hal 9

³³ Michael E. Porter, *The Competitive Advantage of Nations* (Harvard Business Review, 1990), hal 73

³⁴ Stephen Green, *Making Monetary Policy Work in China : A report from the money market front line*, standardchartered, shanghai 2005

³⁵ Nicholas Borst dan Nicholas Lardy, *Maintaining Financial Stability in The People's Republic of China during Financial Liberalization* (Washington DC: Peterson Institute for International Economic 2015), hal 21

Ketika perlambatan ekonomi global terjadi pada tahun 2014 hingga 2015 kebijakan keuangan yang telah ada dalam agenda *third plenum* mengalami perubahan. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Jefri Frieden bahwa :

“ekonomi internasional dapat memberikan pengaruh terhadap pilihan sosioekonomi nasional dan aktor politik. Dalam hal ini tren di ekonomi internasional akan berdampak langsung terhadap kepentingan kelompok-kelompok domestik yang nantinya membawa mereka untuk berpindah ke pilihan kebijakan baru atau merubah perilaku politik domestik”³⁶

Perubahan kebijakan dalam *third plenum* adalah penyesuaian terhadap kondisi perekonomian domestik Tiongkok. Tujuan utama penyesuaian kebijakan ini adalah untuk mendorong agar ekspor kembali ke kondisi normal, sehingga surplus neraca perdagangan dapat dipertahankan.

1.2 Rumusan Masalah

Perubahan kondisi perekonomian global akan memberikan dampak terhadap ekonomi domestik negara. Hal inilah yang terjadi pada Tiongkok pada tahun 2014 hingga 2015 dimana ketika terjadi fluktuasi di ekonomi global mengakibatkan perlambatan ekonomi domestik Tiongkok. Perlambatan ekonomi Tiongkok dapat dilihat dari turunnya nilai ekspor, neraca perdagangan dan PDB. Guna mengatasi perlambatan ekonomi, Tiongkok harus memilih kebijakan yang tepat dalam pilihan-pilihan kebijakan ekonomi khususnya kebijakan keuangan. Maka dari itu peneliti melihat penting untuk menganalisis kebijakan ekonomi Tiongkok dalam menghadapi perlambatan ekonomi global 2014-2015.

³⁶ Jeffrey Frieden, and Lisa Martin, *International Political Economy: Global and Domestic Interactions*, Political Science: The State of the Discipline, Ed. Ira Katznelson & Helen V Milner (New York: W.W. Norton, 2003), hal 120

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian adalah:

Bagaimana kebijakan ekonomi politik Tiongkok dalam menghadapi perlambatan ekonomi global 2014-2015?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara ekonomi politik kebijakan ekonomi politik Tiongkok dalam menghadapi perlambatan ekonomi global 2014-2015.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menambah referensi dalam studi Hubungan Internasional mengenai kebijakan ekonomi politik dalam mengatasi perlambatan ekonomi.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam menghadapi perlambatan perekonomian.

1.6 Studi Pustaka

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa acuan. Acuan pertama adalah jurnal *International Economic and Financial Environment*.³⁷ Membahas mengenai kondisi perekonomian dunia pada tahun 2014. Pada tahun 2014 dunia masih dalam upaya untuk menstabilkan perekonomian paska krisis yang terjadi di 2008-2009. Pertumbuhan di ekonomi utama dunia belum

³⁷ Liu Tung, dan Ding Kang, *International Economic and Financial Environment*, Dalam *China Financial Stability Report 201*, Editor oleh Xuan Changneng, dkk, (Tiongkok Financial Publishing Home, 2015), hal 3-12

sepenuhnya mengalami perbaikan. Ada empat ekonomi utama dunia yang sangat memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi dunia yakni Amerika Serikat, Zona Euro, Jepang dan Negara berkembang. Pembangunan ekonomi, performa pasar keuangan dan kebijakan keuangan yang diambil oleh Negara-negara ini harus diperhatikan oleh para pengambil kebijakan guna meminimalisir resiko dan mengetahui tantangan perekonomian di tahun berikutnya.

Tulisan lainnya yakni esai dari Francois Godement berjudul *China's Economic downturn: The Facts Behind The Myth*.³⁸ Esai ini menjelaskan mengenai perlambatan ekonomi yang terjadi di Tiongkok, penyebab terjadi, dampak dari perlambatan terhadap kondisi domestik Tiongkok dan terhadap internasional, serta kebijakan yang diupayakan diambil oleh pemerintah Tiongkok. Perlambatan ekonomi Tiongkok salah satu satunya disebabkan oleh pengaruh dari perdagangan internasional. Pada tahun 2014 hingga 2015 terjadi penurunan dalam perdagangan asing Tiongkok baik impor maupun ekspor. Ada tiga faktor utama yang menjadi penyebab penurunan perdagangan asing Tiongkok. Pertama, Tiongkok adalah salah satu negara pengimpor barang mentah terbesar dunia seperti minyak, bahan konstruksi seperti aluminium, timah, dan tembaga, dan juga beberapa produk agrikultur seperti gula, kapas, kacang kedelai dan padi-padian, dimana harga barang-barang ini jatuh pada tahun 2014 hingga 2015.

Kedua, terjadi penurunan nilai dari barang ekspor Tiongkok meskipun dalam volume barang tetap terjadi peningkatan. Hal ini diakibatkan karena terjadi

³⁸ Francois Godement, *China's Economic downturn: The Facts Behind The Myth* (Ecf.eu, 2015), hal 2-11

revaluasi renminbi terhadap dolar, selain itu faktor perlambatan dimasing-masing negara tujuan ekspor Tiongkok juga memberikan tekanan seperti Uni Eropa, AS dan beberapa negara berkembang. Ketiga persaingan ekspor dengan negara-negara berkembang lainnya, sehingga Tiongkok harus mengupayakan inovasi baru untuk tetap menjaga agar produk ekspor Tiongkok tetap menguasai pasar dunia.

Penurunan perdagangan asing Tiongkok menyebabkan terjadi penurunan ekspor sehingga surplus neraca perdagangan mengalami penurunan. Perlambatan ekonomi Tiongkok akan memberikan sentimen negatif bagi pengusaha didalam negeri maupun investor asing. Ditambah dengan arah kebijakan pemerintah Tiongkok yang belum jelas di mana Tiongkok seakan telah melakukan perubahan struktural terhadap kebijakan keuangan, namun tindakan Tiongkok tidak memperlihatkan hal itu. Beberapa isu utama terkait kebijakan keuangan Tiongkok tetap mengarah pada kebijakan merkantil yang pernah dipraktekkan Tiongkok. Seperti upaya untuk terus meningkatkan cadangan nilai tukar asing, intervensi terhadap nilai tukar renminbi, dan penyesuaian suku bunga yang termasuk dalam instrumen kebijakan keuangan. Devaluasi renminbi adalah kebijakan yang paling mencolok dilakukan Tiongkok pada tahun 2015 karena dalam agenda kebijakan ekonomi Tiongkok telah menyatakan bahwa tidak ada intervensi terhadap nilai tukar, nilai tukar akan dilepas ke pasar. Kebijakan pelepasan nilai tukar ke pasar memberikan tekanan cukup kuat terhadap ekspor Tiongkok. Kebijakan jangka pendek seperti ini masih menjadi pilihan bagi Tiongkok untuk menstabilkan perekonomian.

Tulisan ketiga, *Explore New Growth Engines for the “New Normal” Economy*.³⁹ Menjelaskan mengenai kondisi perekonomian Tiongkok yang disebut sebagai “*new normal*”. Ekonomi Tiongkok melambat di 2014, PDB berada di sekitar 7,4% jauh lebih rendah di banding rata-rata sekitar 9,9% paska reformasi ekonomi dan kebijakan ekonomi terbuka di 1979. Secara umum pelemahan ekonomi memiliki alasan yang wajar dan memperlihatkan dampak yang positif. *New normal* adalah sebutan untuk perekonomian Tiongkok saat ini, meskipun terjadi penurunan pertumbuhan namun perekonomian lebih stabil dibanding sebelumnya. Beberapa sektor seperti industri tersier dan servis tumbuh positif dan memiliki proporsi yang besar dalam ekonomi. Selain itu industri baru seperti *E-commerce* dan *internet mobile* berkembang dengan pesat. Di 2015 perekonomian Tiongkok akan bergerak lebih kokoh, stabil, struktur yang lebih optimal, serta pembangunan yang lebih efisien dan bertahan lama.

Tulisan selanjutnya adalah *Mercantilism and China’s Hunger for International Reserves*.⁴⁰ Menjelaskan mengenai kebijakan ekonomi Tiongkok yang dipengaruhi oleh ide dari merkantilisme. Dalam tulisan ini pembahasan kebijakan ekonomi difokuskan pada intervensi Tiongkok terhadap nilai tukar. Nilai tukar digunakan Tiongkok untuk mendukung pertumbuhan negara dengan mendorong ekspor yang lebih tinggi. Nilai tukar dibuat tetap berada dalam kondisi *undervalued*. Selain itu Tiongkok juga mengalami peningkatan dalam cadangan nilai tukar asing. Hingga saat ini Tiongkok masih menjadi salah satu negara dengan nilai cadangan mata uang asing terbesar dunia. Tingginya cadangan nilai

³⁹ Chen Weidong, *Explore New Growth Engines for the “New Normal” Economy* (Institute of International Finance Bank Of China, 2014), hal 1-32

⁴⁰ Marcel Schroder, *Mercantilism and China’s Hunger for International Reserves*, (Autralian National University, 2015) hal 1-31

tukar asing digunakan sebagai alat pencegahan terhadap guncangan ekonomi yang mungkin terjadi.

Tulisan kelima, *Maintaining Financial Stability in The People's Republic of Tiongkok during Financial Liberalization*.⁴¹ Menjelaskan pentingnya sistem keuangan yang stabil untuk menjaga pertumbuhan perekonomian Tiongkok. Semenjak Tiongkok membuka diri untuk pasar global, sistem keuangan khususnya di sektor perbankan Tiongkok menjadi yang paling besar di dunia. Tiongkok harus memiliki kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas pasar keuangan karena krisis terjadi akibat kelalaian dalam pengelolaan perbankan seperti yang terjadi di krisis Asia di akhir 1990an dan krisis global pada tahun 2008. Tiongkok masih terlihat tidak konsisten dalam prioritas kebijakan dan regulasi keuangan, seperti intervensi pemerintah di beberapa area di sistem keuangan. Pada tahun 2013 Tiongkok mengeluarkan kebijakan *Third Plenum*. Ada delapan poin utama di dalam kebijakan *third plenum* yang salah satunya fokus pada perbaikan sistem keuangan dan perbankan Tiongkok.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Merkantilisme

Penelitian ini menggunakan perspektif merkantilisme dalam memandang masalah ekonomi politik. Merkantilisme atau ekonomi nasionalis mengalami tiga tahap perkembangan, pertama dari abad 16 hingga abad 18 dimana pada periode ini merkantilisme mendominasi pemikiran utama Eropa Barat yang menyebabkan

⁴¹ Nicholas Borst dan Nicholas Lardy, *Maintaining Financial Stability in The People's Republic of China during Financial Liberalization* (Washington DC: Peterson Institute for International Economic 2015), hal 1-28

berkembangnya beberapa negara seperti Spanyol, Portugal, Jerman, Polandia, Rusia, Swedia, Prancis, Belanda dan Inggris yang membawa Eropa pada zaman modern.⁴² Tahap kedua dari akhir abad ke 19 hingga perang dunia kedua yang disebut sebagai neomerkantilisme, peristiwa utama dalam tahap ini adalah AS dan Jerman yang berhasil melampau Inggris dalam advokasi pasar terbuka dan menjadi kekuatan ekonomi pertama dan kedua dunia. Selain itu juga kemunculan Jepang sebagai satu-satunya negara non Eropa yang menjadi negara maju.⁴³ Periode ketiga dari tahun 1970-an hingga sekarang, dimana peristiwa yang penting adalah munculnya negara berkembang dengan ekonomi pasar dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat.⁴⁴

Merkantilisme memandang bahwa negara punya peran utama dalam mengatur jalannya ekonomi. Dalam bukunya *History of Economic Thought*, Landreth dan Collander mendefinisikan merkantilisme sebagai:

“Pendekatan yang melihat tujuan dari kegiatan ekonomi adalah produksi bukan konsumsi, kekayaan negara bukanlah jumlah dari kekayaan individu namun kekayaan negara dilihat dari bagaimana negara mampu secara simultan mendorong produksi, meningkatkan ekspor, dan menekan konsumsi domestik. Meskipun menekankan pada produksi, jumlah barang yang banyak didalam negara tidak diperbolehkan, melainkan dengan tingkat produksi yang tinggi dan konsumsi domestik yang rendah ekspor di dorong semakin meningkat, yang akan meningkatkan kekayaan dan power negara. Merkantilis menganjurkan upah rendah bagi para pekerja sehingga akan memberikan keunggulan kompetitif bagi negara dalam perdagangan internasional. Jadi tujuan kegiatan ekonomi didefinisikan dalam hal output nasional dan bukan dalam hal konsumsi nasional.”⁴⁵

Negara berfungsi untuk membuat kebijakan yang akan meningkatkan power dan kekayaan negara, tujuan akhirnya adalah menciptakan neraca

⁴² Robert Gilpin, *Global Political Economy: Understanding The International Economic Order* (New Jersey: Princeton University Press, 2001), hal 43

⁴³Ibid

⁴⁴ Ibid, hal 201

⁴⁵ Landreth,H and Colander DC, *History of Economic Thought* (Boston: Houghton Mifflin, 2002), hal 47

perdagangan diantara negara-negara.⁴⁶ Neraca perdagangan diperoleh dengan meningkatkan keunggulan kompetitif dari negara. Keunggulan kompetitif adalah teori persaingan bisnis yang populerkan oleh Michael E. Porter pada tahun 1985 dan disesuaikan dengan persaingan antara bangsa-bangsa, dimana keberhasilan ekonomi satu negara adalah bagian dari proses menang-kalah dengan negara lain. Keunggulan kompetitif suatu negara tergantung pada kemampuan dari industri melakukan inovasi dan meningkatkan kapasitas industri, sedangkan pemerintah dapat melakukan beberapa tindakan dengan mengeluarkan kebijakan untuk mendorong kemampuan industri domestik di pasar internasional.⁴⁷

Kebijakan utama yang dianjurkan merkantilis adalah kebijakan keuangan.⁴⁸ Seperti yang dijelaskan oleh Landreth dan Collander dalam buku *History of Economic Thought* sebagai berikut:

“A central feature of mercantilist literature is its conviction that monetary factors, rather than real factors, are the chief determinants of economic activity and growth. Mercantilists maintained that an adequate supply of money is particularly essential to the growth of trade, both domestic and international. Changes in the quantity of money, they believed, generate changes in the level of real output—in yards of cloth and bushels of grain”⁴⁹

Faktor keuangan menjadi faktor utama yang dianggap menjadi penentu dari aktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Merkantilisme melihat bahwa menjaga kecukupan penawaran uang penting untuk pertumbuhan perdagangan baik di domestik maupun di internasional. Perubahan kuantitas uang dipercaya dapat memberikan perubahan di level *output* rill dari negara. Maka dari itu merkantilisme menganjurkan negara untuk menggunakan kebijakan keuangan

⁴⁶ Ibid, hal 47

⁴⁷ Michael E. Porter, *The Competitive Advantage of Nations* (Harvard Business Review, 1990), hal 73

⁴⁸ Landreth, H and Colander DC, *History of Economic Thought* (Boston: Houghton Mifflin, 2002), hal 48

⁴⁹ Ibid

untuk mendorong perdagangan dengan memberikan kecukupan penawaran uang bagi industri sehingga dapat meningkatkan produksi.

1.7.1.1 Neraca Perdagangan

Merkantilisme berasumsi bahwa total dari kekayaan dunia adalah tetap, oleh karena itu ketika perdagangan terjadi diantara individu maka yang terjadi adalah ketika satu pihak memperoleh apa yang mereka inginkan maka akan mengakibatkan yang lain tidak memperoleh hal yang sama. Hal ini diaplikasikan merkantilisme dalam perdagangan yang terjadi diantara negara, dimana peningkatan kekayaan dan kekuatan ekonomi dari satu negara akan mengakibatkan terjadinya pengurangan terhadap negara lain. Sehingga negara yang menganut merkantilisme menganggap bahwa keterlibatan mereka dalam perdagangan internasional adalah untuk meningkatkan kekayaan dan kekuatan, khususnya membentuk neraca perdagangan diantara negara.⁵⁰

Neraca perdagangan dideskripsikan sebagai selisih antara nilai ekspor dan impor dalam keseluruhan output yang dihasilkan negara dalam satu periode tertentu.⁵¹ Ketika neraca perdagangan berada diposisi positif maka perdagangan berarti surplus, hal ini terjadi ketika ekspor lebih tinggi di banding impor dan perdagangan berarti defisit jika mengalami kondisi sebaliknya. Negara yang melakukan lebih banyak ekspor daripada impor memiliki lebih banyak kesempatan untuk memperoleh surplus neraca perdagangan dibandingkan negara yang melakukan sebaliknya. Kondisi neraca perdagangan yang dianjurkan merkantilisme adalah kondisi surplus.

⁵⁰ Ibid, h 47-48

⁵¹ Jarrod Wiener dan Robert A. Schrire, *International Relations* (United Kingdom: Eolss Publishers Co.Ltd, 2009) hal 25

Kondisi surplus neraca perdagangan akan memberikan keuntungan bagi negara. Kondisi surplus berarti ekspor lebih tinggi dibanding impor, ekspor akan menimbulkan penerimaan pembayaran atau piutang, sedangkan impor akan mengakibatkan kewajiban membayar ke luar negeri atau utang. Maka surplus neraca pembayaran akan menyebabkan negara menerima lebih banyak pembayaran dari luar negeri sehingga akan meningkatkan kekayaan, dan sebaliknya defisit akan mengakibatkan negara lebih banyak membayar keluar negeri atau meningkatkan utang negara.

Dalam upaya mencapai surplus neraca perdagangan pemerintah berfungsi untuk mengontrol perdagangan asing dengan tujuan untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan negara.⁵² Dalam upaya untuk memperoleh kondisi positif neraca perdagangan yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kekayaan negara maka pemerintah akan mengeluarkan regulasi yang fokus pada kepentingan komersial. Peningkatan ekspor dibanding impor dalam perdagangan internasional akan meningkatkan keuntungan neraca perdagangan negara karena mengalami surplus.

Merkantilis percaya bahwa sumber daya dunia terbatas sehingga negara harus memiliki kelebihan dibanding negara lain dengan bersaing di tingkat harga.⁵³ Dalam rangka untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan, satu-satunya cara adalah mempertahankan volume ekspor. Namun di perdagangan internasional banyak barang yang di produksi sehingga keunggulan yang harus dimiliki negara adalah harga yang rendah. Oleh karena itu negara merkantilis

⁵² Ibid, hal 27

⁵³ Ibid

tidak menganjurkan untuk melakukan ekspor barang mentah, tetapi menganjurkan untuk memproses barang mentah menjadi barang jadi untuk diekspor. Sebaliknya impor yang dianjurkan adalah barang mentah yang akan digunakan untuk industri manufaktur. Bahan mentah yang di impor akan diproses menjadi barang jadi akan di ekspor kembali dengan harga yang lebih tinggi.

Didalam penelitian ini, neraca perdagangan digunakan untuk melihat perilaku Tiongkok di perdagangan internasional. Melalui neraca perdagangan dapat diperlihatkan bagaimana Tiongkok dalam usaha meningkatkan power dan kekayaan negara menjadikan ekspor sebagai sumber utama dalam perekonomian. Tiongkok termasuk dalam salah satu negara dengan jumlah ekspor yang tinggi di perdagangan internasional dan negara yang juga mengkonsumsi sebagian besar barang mentah dunia.

1.7.1.2 Kebijakan Keuangan

Merkantilis menganjurkan negara untuk menggunakan kebijakan keuangan untuk membuat ekonomi domestik menjadi stabil dan menguntungkan bagi industri domestik.⁵⁴ Kondisi ekonomi yang stabil akan berdampak pada peningkatan produksi yang nantinya akan meningkatkan jumlah ekspor negara. Kebijakan keuangan dikeluarkan oleh Bank Sentral suatu negara. Bank Sentral berfungsi untuk mengontrol jumlah peredaran uang dan menjaga inflasi.⁵⁵ Dengan asumsi bahwa kecepatan moneter adalah konstan, Bank Sentral bertujuan untuk menyuplai kecukupan uang baru dalam ekonomi dan pertumbuhan uang

⁵⁴ Keith Rankin, *Mercantilist reasoning in economic policy making* (New Zealand Association of Economists, 2011), hal 7

⁵⁵ Stephen Green, *Making Monetary Policy Work in China : A report from the money market front line* (standardchartered, shanghai 2005) hal 2

setara dikombinasikan dengan permintaan terhadap barang dan jasa (PDB) dan inflasi.⁵⁶ Permasalahannya adalah Bank Sentral tidak dapat mengontrol secara langsung jumlah peredaran uang.

Uang dapat tumbuh melalui tiga cara.⁵⁷ Pertama melalui bank/deposito yakni bank membuka deposito/simpanan baru dan meminjamkan, peminjam akan menandatangani kembali pinjaman mereka ke bank, dan pinjaman baru akan terbentuk kembali. Proses ini tidak terbatas jika bank memiliki regulasi rasio cadangan yakni sebuah tindakan dari bank untuk menyimpan sejumlah deposit di Bank Sentral. Kedua uang bisa berasal dari luar negeri. Jika perdagangan mengalami surplus, dan nilai tukar berada dibawah level equilibrium yang telah ditentukan, maka akan terjadi uang masuk (*inflow*) dari nilai tukar asing ke ekonomi. Pelaku ekspor akan menukarkan mata uang asing mereka menjadi nilai tukar lokal di bank komersial, dan bank komersial akan menyalurkan kembali ke Bank Sentral untuk menukar kembali dengan nilai tukar lokal. Sehingga jumlah peredaran uang akan meningkat. Untuk menjaga agar tidak terjadi inflasi akibat uang yang beredar meningkat maka Bank Sentral harus mensterilisasi *inflow* ini. Ketiga uang dapat tumbuh dari pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah. Jika sebuah pemerintah melakukan penjualan sekuritas untuk mendanai defisit yang terjadi dan pasar privat menolak untuk melakukan pembelian maka Bank Sentral dapat membantu untuk membeli dan pembelian ini akan mengakibatkan banyaknya uang yang dicetak.

⁵⁶ Ibid hal 3

⁵⁷ Ibid hal 3

Meskipun Bank Sentral tidak dapat melakukan kontrol langsung terhadap jumlah peredaran uang tetapi Bank Sentral dapat mempengaruhi tiga penyebab dari peredaran uang tersebut. Ada tiga cara yang dapat dilakukan oleh Bank Sentral, pertama operasi pasar terbuka (*open market operations/OMOs*). Tindakan ini dapat berupa pelibatan dari Bank Sentral untuk membeli (menjual/mengeluarkan) sekuritas, dan menyuntikkan uang dasar ke atau dari sistem keuangan. Selain itu juga dapat melakukan sebuah cash atau basis repo. Kebijakan ini adalah instrumen kebijakan utama yang biasanya digunakan oleh negara dengan ekonomi yang mapan.

Kedua merubah harga yang dapat dipinjam oleh bank dari Bank Sentral seperti menentukan suku bunga. Namun instrumen ini biasanya tidak digunakan sebanyak OMOs yang dapat langsung berdampak pada pasar mata uang. Kebijakan suku bunga mencakup kebijakan suku bunga kredit dan deposito. Menaikkan dan menurunkan suku bunga kredit bertujuan untuk mengendalikan angka penyaluran kredit yang berlaku dimasyarakat. Pada saat tingkat suku bunga dinaikkan bertujuan agar uang yang tersalurkan melalui kredit dapat berlangsung secara selektif, dimana hanya pihak-pihak tertentu yang mampu mengembalikan pinjaman yang dapat menerima. Ketika tingkat suku bunga diturunkan bertujuan untuk meningkatkan pinjaman oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan aktifitas ekonomi. Begitu juga ketika suku bunga deposito dinaikkan bertujuan untuk menyerap dana masyarakat ke perbankan, dan sebaliknya. Secara keseluruhan tindakan menaikkan atau menurunkan suku bunga adalah upaya untuk menciptakan kestabilan uang yang beredar dipasaran.

Instrumen ketiga yakni menekan bank untuk menahan lebih banyak atau lebih sedikit uang dalam simpanan mereka di Bank Sentral. Memanipulasi cadangan uang ini adalah dasar dari sistem keuangan, lebih banyak uang yang disimpan dalam cadangan di Bank Sentral maka semakin banyak dana yang dapat digunakan bank untuk memberikan pinjaman kepada peminjam.

Dalam penelitian ini kebijakan keuangan digunakan untuk melihat tindakan dari Tiongkok dalam merespon krisis yang terjadi, yakni perlambatan ekonomi global 2014-2015. Tiongkok menggunakan instrumen kebijakan keuangan untuk mengembalikan kestabilan ekonomi domestik. Ekonomi domestik yang stabil diperlukan oleh Tiongkok untuk tetap menjaga industri domestik tetap menghasilkan *output* yang tinggi untuk ekspor sehingga surplus neraca perdagangan tetap terjaga.

1.7.2 Teori Stabilitas Hegemoni

Teori stabilitas hegemoni adalah teori untuk memahami peran yang dimainkan oleh hegemon dan hubungannya dengan pembangunan ekonomi dan stabilitas politik di struktur internasional.⁵⁸ Hegemon diartikan sebagai pemimpin dalam sebuah struktur internasional yang mana hegemon akan menggunakan povernya untuk mewujudkan kepentingan yang ingin dicapainya.⁵⁹ Sehingga poin kunci dari teori ini adalah harus adanya hegemon sebagai power dominan tunggal di sistem internasinal untuk menjamin kestabilan ekonomi dan politik

⁵⁸Mohd Noor Mat Yazid, *The Theory of Hegemonic Stability, Hegemonic Power and International Political Economic Stability* (Europen Centre For Research Training And Development UK, 2015) Hal 68

⁵⁹ Robert Gilpin, *Global Political Economy: Understanding The International Economic Order* (Princeton Univerity Press, 2001), hal 99

internasional. Hanya hegemon yang mampu mewujudkan aturan internasional yang nantinya akan memfasilitasi hubungan antara negara-negara.

Hegemon dapat mewujudkan aturan internasional karena hegemon memiliki power terkuat diantara negara-negara di struktur internasional tersebut. Guna menjadi power terkuat maka hegemon harus memiliki kemampuan salah satunya adalah ekonomi yang kuat.⁶⁰ Negara hegemon harus memiliki teknologi ekonomi maju dan terbesar di dunia. Selain itu juga memiliki hubungan ekonomi atau mitra dagang bagi banyak negara di dunia termasuk dengan negara pemilik power utama di dunia. Ketika sebuah negara menjadi hegemon maka negara tersebut bersama dengan aliansinya dapat menentukan wacana atau norma bersama yang mengatur hubungan negara-negara di struktur internasional dan lebih banyak memiliki kekuatan untuk mengontrol institusi internasional. Kemampuan ini akan memberikan keuntungan bagi negara hegemon untuk memperkuat posisi ekonomi dan politik sehingga dapat mewujudkan kepentingan yang hendak dicapai.

Teori stabilitas hegemoni dapat memperlihatkan upaya perimbangan kekuasaan (*balance of power*) dari sebuah hegemon dan negara *rising power* di sistem internasional.⁶¹ Paska perang dunia kedua AS muncul sebagai satu-satunya negara yang memiliki kemampuan sebagai hegemon. AS memiliki ekonomi yang kuat, power politik dan kekuatan militer yang kuat paska perang dunia kedua. Meskipun Uni Soviet muncul sebagai pesaing atau *counter hegemonic power* pada

⁶⁰ Tony Tai-Tung Liu dan Hung Ming-Te, *Hegemonic Stability and Northeast Asia : What Hegemon? What Stability?* (Journal of Asia Pasific Studies, 2011) hal 219

⁶¹ Francois Joseph, *The U.S Economic Hegemony and The Rise of China* (Linnaeus University School of Social Sciences Department of Political Science, 2013) hal 19

masa perang dingin, namun Uni Soviet tidak berhasil menggantikan posisi AS sebagai hegemon dunia. Kemudian Tiongkok muncul sebagai negara dengan perkembangan ekonomi yang cepat paska reformasi ekonomi pada tahun 1979.

Teori ini digunakan untuk melihat posisi Tiongkok dalam struktur internasional yakni sebagai *rising power*. Sebagai *rising power*, Tiongkok juga menggunakan kemampuan ekonomi untuk menyeimbangkan power terhadap negara hegemon. Teori ini juga digunakan untuk memperkuat argumentasi dari teori merkantilisme mengenai penggunaan kemampuan ekonomi untuk memperoleh power di dunia internasional.

1.8 Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metodologi penelitian tipe penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian adalah usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁶² Dari pengertian tersebut, metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan mengenai metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan.⁶³ Ilmu tersebut mencari cara-cara untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam, baik yang nampak atau tidak.⁶⁴

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metodologi penelitian tipe penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menyederhanakan sebuah kondisi, situasi, dan fenomena realitas sosial yang

⁶²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta Universitas Gajah Mada, 1969), hal 4

⁶³Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Edisi ke-13, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2012), hal 26

⁶⁴Ibid

terdapat di masyarakat.⁶⁵ Pada tipe penelitian ini, peneliti memusatkan penelitian di satu unit dalam sebuah fenomena yang diangkat, sehingga menjadikan hasil penelitian memiliki makna mendalam.⁶⁶ Jadi, penelitian deskriptif kualitatif cocok digunakan untuk penelitian yang menginginkan hasil pemahaman yang mendalam.⁶⁷ Seperti dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis kebijakan ekonomi politik Tiongkok dalam menghadapi perlambatan ekonomi global 2014-2015. Dimana penelitian ini bertujuan untuk memahami isu yang diangkat sehingga tipe penelitian kualitatif deskriptif cocok digunakan.

1.8.1 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan pada analisis ekonomi politik kebijakan ekonomi politik Tiongkok dalam menghadapi perlambatan ekonomi global 2014-2015 dengan batasan penelitian dari tahun 2013 hingga 2015. Penelitian ini hanya akan mendeskripsikan kebijakan ekonomi politik Tiongkok khususnya kebijakan keuangan Tiongkok dalam menghadapi perlambatan ekonomi global, sehingga penelitian ini tidak mendeskripsikan dampak dari kebijakan keuangan Tiongkok terhadap kondisi perekonomian.

1.8.2 Unit dan Tingkat Analisa

Unit analisis atau variabel dependen adalah objek kajian yang perilakunya akan dijelaskan, dideskripsikan dan diramalkan sebagai akibat dari variabel lain.⁶⁸ Variabel yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan variabel lainnya dan terjadi sebelum variabel dependen disebut variabel independen atau

⁶⁵Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Edisi Ke-2 (Jakarta, Kencana, 2007), hal 68

⁶⁶Ibid, hal 68-69

⁶⁷Ibid, hal 69

⁶⁸ Moctar Masho'eod, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi* (Pusat antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gajah Mada. LP3ES), hal 110

unit ekplanasi.⁶⁹ Tingkat analisis merupakan unit yang menjadi landasan keberlakuan pengetahuan tersebut. Dari penjelasan ini, unit analisis dalam penelitian ini adalah negara yakni Tiongkok khususnya mengenai kebijakan ekonomi politik Tiongkok, unit ekplanasi adalah perlambatan ekonomi global 2014-2015, dan tingkat analisis adalah sistem internasional.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu menggunakan penelitian atau tulisan dari peneliti lainnya. Data sekunder tersebut didapatkan melalui telaah pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan berbagai data dari literatur-literatur seperti jurnal, buku, artikel, dan bahan tertulis lainnya. Serta pemberitaan dari media elektronik dan cetak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data-data yang didapat dari berbagai literatur tersebut, digunakan sebagai bahan untuk membantu menganalisa fenomena yang dibahas dalam penelitian.

1.8.4 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam mengolah data, peneliti akan memilah-milah informasi yang diperoleh dan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data teoritis yang berhubungan dengan penelitian yang ditulis. Data ini diperoleh dari berbagai literatur dan hasil olahan dari berbagai sumber terkait. Data teoritis inilah yang kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ditentukan. Di samping itu juga terdapat berbagai data numerik dan statistik, untuk membantu pembuktian praktis proses analisa kajian skripsi ini.

⁶⁹ ibid

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Dengan teknik ini, analisis ditekankan pada data kualitatif yang analisisnya akan diarahkan pada data non-matematis. Namun untuk data pelengkap, juga disertakan data kuantitatif berupa angka-angka statistik serta bantuan ilustrasi melalui tabel dan grafik yang memiliki keterkaitan dengan obyek penelitian, yang penekanannya tetap diarahkan pada interpretasi serta analisa dari data kuantitatif ini.

Tahap penelitian ini akan dimulai dengan mengumpulkan data-data mengenai perekonomian Tiongkok sebelum perlambatan ekonomi 2014-2015 termasuk didalamnya bentuk kebijakan ekonomi yang dilaksanakan. Selanjutnya peneliti mengumpulkan data-data mengenai perlambatan ekonomi global yang terjadi pada tahun 2014 hingga 2015, dan mengidentifikasi dampak-dampak yang diakibatkan oleh perlambatan ekonomi global 2014-2015 tersebut terhadap ekonomi domestik Tiongkok. Kemudian peneliti mengumpulkan data-data mengenai kebijakan ekonomi khususnya kebijakan keuangan yang diambil Tiongkok selama perlambatan ekonomi berlangsung. Kebijakan ekonomi yang dilakukan Tiongkok akan dianalisis menggunakan pendekatan merkantilisme. Merkantilisme akan membantu peneliti untuk mengidentifikasi kebijakan ekonomi yang diambil Tiongkok untuk menghadapi perlambatan ekonomi global 2014-2015.

1.9 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan latar belakang masalah yang menjelaskan secara singkat gambaran dari penelitian yang akan dilakukan melalui fakta-fakta. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual dan metodologi penelitian.

BAB II TIONGKOK SEBAGAI *EMERGING MARKET* DAN PERIMBANGAN KEKUASAAN TERHADAP HEGEMONI AMERIKA SERIKAT

Bab ini akan memaparkan mengenai pertumbuhan perekonomian Tiongkok dari awal reformasi ekonomi pada tahun 1979 hingga sebelum perlambatan ekonomi global 2014-2015. Kemudian juga akan dipaparkan mengenai pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan perimbangan kekuasaan terhadap hegemoni AS.

BAB III PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL 2014-2015 DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN TIONGKOK

Bab ini akan menjelaskan mengenai perlambatan ekonomi global 2014-2015 dan dampaknya terhadap perekonomian Tiongkok

BAB IV KEBIJAKAN EKONOMI POLITIK TIONGKOK DALAM MENGHADAPI PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL 2014-2015

Bab ini akan mendeskripsikan kebijakan keuangan yang digunakan Tiongkok sebagai kebijakan yang digunakan dalam menghadapi perlambatan ekonomi global 2014-2015.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian.